

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)									
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat									
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien									
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan					Penanggung Jawab
		IndikatorKinerjaSasaran Strategis Esselon II							
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan, Keamanan dan Stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Banten	Capaian Poin Demokrasi Kategori Baik dan Berkualitas pada Aspek Kebebasan Sipil, Hak-Hak Politik dan Institusi Demokrasi	KATEGORI/KRITERIA DEMOKRASI	INDEKS KOMPOSIT	POIN	VARIABEL		Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				IDI (DEMOKRASI YANG BAIK DAN BERKUALITAS)	Kebebasan Sipil	100	- Kebebasan Berkumpul dan Berserikat - Kebebasan Berpendapat - Kebebasan Berkeyakinan - Kebebasan dari Diskriminasi		
					Hak-HakPolitik		- Hak Memilih dan Dipilih - Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan		
					Institusi Demokrasi		- Pemilu yang Bebas dan Adil - Peran DPRD - Peran Partai Politik - Peran Birokrasi Pemerintah Daerah - Peran Peradilan yang Independen		

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)								
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat								
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien								
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan				Penanggung Jawab
				80 - 100	BAIK BERKUALITAS	Kebebasan Sipil Hak-Hak Politik Institusi Demokrasi		
				60 - 79	CUKUP			
				50-59	KURANG BAIK			
		Penanganan Konflik Masyarakat	Penurunan Angka Konflik Masyarakat di Provinsi Banten (Konflik Sosial, Politik, Ekonomi, SARA)	$= \frac{Jumlah\ penanganan\ konflik}{Jumlah\ konflik\ dalam\ 1\ tahun} \times 100$				
Indikator Kinerja Program (Esselon III)								
1.	Meningkatnya Pembinaan Ideologi dan Wawasan Kbangsaan	Cakupan Pembinaan dan Penguatan 4 (empat) Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, NKRI)	Presentase Penguatan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Wasbang) serta Pembinaan Kewarganegaraan	$\frac{Jumlah\ Kelompok\ Masyarakat\ yg\ mendapatkan\ pembinaan\ Wasbang\ dan\ Kewarganegaraan}{Jumlah\ Kelompok\ Masyarakat\ Demokrasi} \times 100$				Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
2.	Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dari Gangguan Keamanan	Presentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional dalam Mendukung Stabilitas Daerah	Capaian Penurunan Potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) warga Negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	$\frac{Jumlah\ ATHG\ yang\ ditangani}{Jumlah\ Potensi\ ATHG} \times 100$ Sumber : Permendagri No. 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 46 Tahun 2019.				Kepala Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi
3.	Meningkatnya Ketahanan Sosial dan Ekonomi melalui pembinaan pada Ormas	Persentase Ormas yang mendapatkan Pembinaan	Capaian Peningkatan Ketahanan Sosial dan Ekonomi (melalui Pembinaan pada Ormas, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda,	$\frac{Jumlah\ Kelompok\ Masyarakat\ yang\ ditingkatkan\ Ketahanan\ Sosial\ Ekonomi}{Jumlah\ seluruh\ kelompok\ masyarakat} \times 100$				Kepala Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik

Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)					
Tujuan: Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat					
Sasaran Daerah: Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan Efisien					
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik					
NO	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/Program	Definisi Operasional	Rumus Perhitungan	Penanggung Jawab
			UMKM dan Masyarakat Pelaku Ekonomi)		
4.	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Angka pemilu / pemilukada	Presentase jumlah penduduk yang berpartisipasi mengikuti pemilu/pemilukada dibandingkan dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang berpartisipasi mengikuti pemilu / pemilukada}}{\text{Jumlah DPT}} \times 100$	Bidang Bidang Kewaspadaan Nasional